

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 7, Nomor 1, Juli 2019
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Pemimpin Redaksi / Redaktur : Mardisontori, S.Ag., LLM.
Editor : Akhmad Aulawi, S.H., M.H.
Ricko Wahyudi, S.H.,M.H.
Khopiatuziadah, S.Ag., LLM.
Yeni Handayani, S.H., M.H.
Bagus Prasetyo, S.H., M.H.
Nita Ariyulinda, S.H., M.H.
Arif Usman, S.H., M.H.
Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.
R. Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.
Mitra Bestari : Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., PhD.
Desain Grafis : Achmadudin Rajab, S.H., M.H.
Noor Ridha Widiyani, S.H.
Noval Ali Muchtar, S.H.
Sekretariat : Fahmi Asy'ari, S.Sos.
Ani Maryani, S.E.
Muhamad Yunus, S.H.
Syarifudin
Ade Hardha Gunawan

Alamat
Redaksi Prodigy Jurnal Perundang-Undangan
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Kode Pos 10270
e-mail: prodigyjurnalilmiah@gmail.com dan jurnal.prodigy@dpr.go.id

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 7, Nomor 1, Juli 2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Pengantar Redaksi.....	iv
Lembar Abstrak	v-xxiv
Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Berdasarkan Perspektif Fungsi Anggaran dan Prinsip <i>Checks and Balances</i> <i>Rastri Paramita</i>	1-14
Urgensi Meningkatkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang dalam Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013, No. 66/PUU-XI/2013, dan No. 30/PUU-XVI/2018) <i>Achmadudin Rajab, S.H., MH.</i>	15-33
Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Feminisme <i>Sali Susiana</i>	34-51
Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 <i>Khopiatuziadah</i>	52-69
Analisis terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik <i>Meirina Fajarwati</i>	70-86
Analisis Hukum Perlindungan Hukum Nasabah Teknologi Finansial/ <i>Financial Technology (Fintech)</i> <i>Arif Usman</i>	87-105
Kajian Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan Pariwisata dan Pemajuan Kebudayaan dalam Menunjang Peningkatan Perekonomian di Indonesia <i>Bagus Prasetyo</i>	106-124

Implikasi Hukum atas Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat <i>Kuntari</i>	125-138
Urgensi Pengaturan Bank Tanah di Indonesia <i>R.Priharta Budiprasetya E.P.Y</i>	139-155
Promosi Produk Kosmetik melalui <i>Endorsement</i> di Instagram dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen <i>Atisa Praharini</i>	156-167
Kajian Yuridis Pelindungan Hak Cipta Koleksi Legal Deposit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam <i>Chairul Umam</i>	168-182
Pemberantasan Pengaturan Skor di Kompetisi Liga Indonesia oleh Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola menurut Prinsip Non-Intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI <i>Olsen Peranto</i>	183-202

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 7 Nomor 1, Juli 2019. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Berdasarkan Perspektif Fungsi Anggaran dan Prinsip Checks and Balances; Kedua, Urgensi Meningkatkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang dalam Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 31/PUU-XI/2013, NO. 66/PUU-XI/2013, DAN NO. 30/PUU-XVI/2018); Ketiga, Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Perspektif Feminisme; Keempat, Telaah Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Bingkai Pancasila; Kelima, Analisis Terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik; Keenam, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Teknologi Finansial/Financial Technology (Fintech); Ketujuh, Kajian Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan Pariwisata dan Pemajuan Kebudayaan dalam Menunjang Peningkatan Perekonomian di Indonesia; Kedelapan, Implikasi Hukum atas Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat; Kesembilan Urgensi Pengaturan Bank Tanah di Indonesia; Kesepuluh, Promosi Produk Kosmetik Melalui Endorsement di Instagram dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen; Kesebelas, Kajian Yuridis Pelindungan Hak Cipta Koleksi Legal Deposit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Keduabelas, Pemberantasan Pengaturan Skor di Kompetisi Liga Indonesia oleh Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola menurut Prinsip Non-Intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2019

Redaksi

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Rastri Paramita

Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Berdasarkan Perspektif Fungsi Anggaran dan Prinsip *Checks and Balances*

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 113-128

Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan lahir dari tafsir sumpah anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili serta akibat pelaksanaan pengelolaan keuangan negara kerap terdapat gap antara kebutuhan rakyat dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) dalam perspektif fungsi anggaran dan prinsip *check and balances*. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil dari kajian ini adalah kedudukan hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dalam perspektif fungsi anggaran tidak sejalan dengan fungsi dan wewenang DPR dalam melaksanakan fungsi anggarannya dan tidak sesuai dengan UU tentang MD3 serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU tentang SPPN). Sedangkan kedudukan hak ini dari perspektif *checks and balances*, berpotensi menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan karena keinginan DPR untuk masuk dalam teknis perencanaan pembangunan yang merupakan kewenangan pemerintah.

Kata kunci: Program pembangunan daerah pemilihan, fungsi anggaran, *checks and balances*

The Right Propose and Struggle for Electoral Development Programs in the Election District the Law No. 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD, and DPRD Based on the Perspective of Budget Functions and the Principle of Checks and Balances

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 113-128

The right to propose and fight for electoral development programs was born from the oath interpretation of DPR members in fighting for the people's aspirations represented and as a result of the implementation of state financial management often with gaps between people's needs and the government's ability to meet those needs. The purpose of this study is to find out the position of the right to propose and fight for electoral development programs in Law Number 17 of 2004 concerning People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Council, and Regional Representative Council (Law on MD3) in the perspective of budget functions and the principle of checks and balances. The research methodology used is a qualitative approach using a normative juridical approach. The discussion in this study uses a legislative approach, comparative approach, and conceptual approach. The result of this study is the position of the right to propose and fight for electoral development programs in the perspective of budget functions and not in accordance Law on MD3 and Law Number 25 of 2004 on National Development Planning System (Law on NDPS). Whereas the position of this right from the perspective of checks and balances has the potential to violate the principle of separation of power due to desire of the DPR to be included in technical development planning which is the authority of the government.

Keywords: Electoral development programs, budget functions, checks and balances

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Achmadudin Rajab, S.H., MH.

Badan Keahlian DPR RI

Urgensi Meningkatkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang dalam Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013, No. 66/PUU-XI/2013, dan No. 30/PUU-XVI/2018)

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 129-144

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memiliki sifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku sejak diucapkan secara umum dalam sidang pembacaan putusan. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi bilamana suatu ayat, pasal, ataupun bab yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi adalah tidak berlakunya norma tersebut sehingga setiap pihak seharusnya melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian dalam beberapa perkara seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018, ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dan bahkan tidak kunjung ada revisi undang-undang yang seharusnya dilakukan. Hal ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena ketidakpatuhan pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi justru bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Masalah yang muncul dari sejumlah putusan tersebut diatas adalah bagaimana seharusnya pembentuk undang-undang menindaklanjuti tiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan apa upaya yang dapat dilakukan agar kedepannya pembentuk undang-undang dapat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari kedua hal tersebut yakni bagaimana menindaklanjuti tiga putusan Mahkamah Konstitusi dan solusi agar dapat meningkatkan kepatuhan pembentuk undang-undang dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dampak yang ditimbulkan maka cukup beralasan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, kepatuhan pembentuk undang-undang, perubahan undang-undang

***Urgency to Increase Compliance of Lawmaker in Addressing the Constitutional Court Verdict
(Case Study from the Constitutional Court Verdict No. 31/PUU-XI/2013, No. 66/PUU-XI/2013,
and No. 30/PUU-XVI/2018)***

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 129-144

The constitutional court verdict in matters relating to by testing the act of the constitution of the Republic of Indonesia of 1945 is having the nature of the final and binding. The effective of the constitutional court is applicated after the reading in the court. The impact of the constitutional court and a verse, article, or the declared contrary to the constitution is not the norm the each side should make the decisions the constitutional court. However in some cases as in the Constitutional Court Verdict No. 31/PUU-XI/2013, Constitutional Court Verdict No. 66/PUU-XI/2013, and the Constitutional Court Verdict No. 30/PUU-XVI/2018, these three verdicts upon the constitutional court and even lack is the revision of act which should be achieved. This is an interesting study to be researched for disobedience of lawmaker in addressing constitutional court verdicts is contrary to the nature of the constitutional court itself. Problems that arise from a number of the three verdict is how to lawmaker react of the three contituional court verdict and that the efforts to be made to adhere lawmaker in the future to the constitutional court. The purpose of this writing is to get answers from both how follow up three of the constitutional court and solutions to increase compliance lawmaker in the constitutional court. This writing using juridical normative method with legislation approach. Because of some constitutional court verdict and its implication, it reasonable to revised the act of conditutional court, act of the forming of the law, and bill of of the house of representatives.

Keywords: constitutional court verdict, compliance of lawmaker, revised of the act

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Sali Susiana

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

**Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Dari Perspektif Feminisme**

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, Juni 2016, halaman 145-161

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU tentang P-KS) telah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Berbagai pro kontra tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya urgensi pembentukan RUU tentang P-KS. Tulisan ini mengkaji urgensi pembentukan RUU tentang P-KS dari perspektif feminisme melalui pertanyaan berikut: bagaimana teori feminisme memandang mengenai kekerasan seksual? dan apa urgensi pembentukan RUU tentang P-KS dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis? Tulisan ini bertujuan menguraikan urgensi pembentukan RUU tentang P-KS dari perspektif feminisme, dengan metode penulisan sebagai berikut: latar belakang yang berisi pro-kontra mengenai RUU tentang P-KS; pembahasan yang berisi konsep yang terkait dengan kekerasan seksual dan teori Feminisme Radikal yang digunakan sebagai alat analisis, serta urgensi pembentukan RUU tentang P-KS dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; dan penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perspektif feminisme, kekerasan seksual adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi akibat adanya budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Adapun urgensi pembentukan RUU tentang P-KS yaitu: pertama, dari aspek filosofis, RUU tentang P-KS diperlukan karena setiap warga negara, termasuk perempuan, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kedua, dari aspek sosiologis, jumlah korban kekerasan seksual semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembentukan RUU tentang P-KS diperlukan untuk melindungi dan merehabilitasi korban kekerasan seksual serta mencegah terjadinya korban kekerasan seksual. Ketiga, dari aspek yuridis, belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual. Oleh karena itu DPR harus segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang P-KS.

Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Urgency for Making the Bill of the Elimination of Sexual Violence from the Feminist Perspectives

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 145-161

The Bill on the Elimination of Sexual Violence (Bill on P-KS) has led to pro-contra in society. The various pros and cons raise the question, how exactly is the urgency of the formation of the Bill on P-KS. This paper examines the urgency of the establishment of the Bill on P-KS from a feminist perspective through the following question: how does the theory of feminism regarding to sexual violence? and what is the urgency of the establishment of the Bill on P-KS from philosophical, sociological and juridical aspects? This paper aims to describe the urgency of the drafting of the Bill on P-KS from a feminist perspective, with the following writing methods: a background that contains the pros and cons of the Bill on P-KS; the discussion which contains concepts related to sexual violence and the theory of Radical Feminism which is used as an analytical tool, as well as the urgency of the formation of a Bill on P-KS from philosophical, sociological, and juridical aspects; and closing which contains conclusions and recommendations. The results of the analysis show that in the perspective of feminism, sexual violence is gender based violence that results from a patriarchal culture that places women's position lower than men. The urgency of the establishment of the Bill on P-KS, namely: first, from a philosophical aspect, a bill on P-KS is needed because every citizen, including women, has the right to feel safe and free from all forms of violence and discrimination. Second, from the sociological aspect, the number of victims of sexual violence is increasing from year to year. The formation of a Bill on P-KS is needed to protect and rehabilitate victims of sexual violence and prevent victims of sexual violence. Third, from the juridical aspect, there is no specific law that regulates the elimination of sexual violence. Therefore the DPR must immediately complete the discussion of the Bill on P-KS.

Keywords: violence against women, sexual violence, the Bill on the elimination of sexual violence

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Khopiatuziadah

Badan Keahlian DPR RI

Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 162-178

Air dan sumber daya air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebelumnya diatur dalam UU tentang SDA, namun kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konsitusi. Saat ini landasan hukum pengaturan sumber daya air kembali menggunakan UU tentang Pengairan. Mengingat persoalan yang dihadapi sudah tidak dapat lagi diatasi dengan UU tentang Pengairan, maka harus segera dibentuk suatu undang-undang yang menggantikan UU tentang SDA. Dalam pengaturannya kelak, sumber daya air seharusnya dikelola dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan aspek penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemenuhan hak rakyat atas air, dan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Ketiga hal ini merupakan aspek yang diturunkan dari nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Kata kunci: sumber daya air, Pancasila, penguasaan negara, hak rakyat atas air

Water Resources Management Based on Pancasila and the 1945 Constitution

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 162-178

Water and water resources are very important resources for the lives of many people. The management of water resources in Indonesia was previously regulated in the Law on Water Resources, but was later revoked and declared invalid by the Constitutional Court. At present the legal basis for regulating water resources again uses the Law on Irrigation. Considering that the problems faced were no longer able to be overcome by the Law on Irrigation, a law must be immediately adopted to replace the Law on Water Resources. In its future arrangement, water resources should be managed by taking into account the values contained in the Pancasila. At least the management of water resources must pay attention to aspects of state authority over water resources, fulfillment of people's rights to water, and preservation and sustainable management. These three things are aspects derived from divinity and social justice in Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: water resources, Pancasila, State authority, people's rights to water

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Meirina Fajarwati

Badan Keahlian DPR RI

Analisis terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 179-193

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan di ruas jalan Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Pergub No. 25 Tahun 2017) yang mengatur jenis dan tarif kendaraan yang dapat melewati wilayah tersebut. Namun jenis kendaraan yang dikenakan tarif layanan dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disebut PP No. 97 Tahun 2012). Permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana pengaturan manajemen kebutuhan lalu lintas melalui penerapan jalan berbayar elektronik dan bagaimana pengaturan jalan berbayar elektronik dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan. Tulisan bertujuan untuk mengetahui pengaturan manajemen kebutuhan lalu lintas melalui penerapan jalan berbayar elektronik dan pengaturan jalan berbayar elektronik dalam Pergub No. 25 Tahun 2017 ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan yuridis normatif. Manajemen kebutuhan lalu lintas salah satunya dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan barang pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. Dalam praktiknya terdapat ketidakselarasan mengenai objek retribusi pengendalian lalu lintas yang tercantum dalam peraturan gubernur dan peraturan pemerintah dan hal ini tidak sejalan dengan konsep hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung.

Kata kunci: manajemen kebutuhan lalu lintas, jalan berbayar elektronik, retribusi pengendalian lalu lintas

***Juridical Analysis of the Governor Regulation Number 25 Year 2017
on the Concerning Traffic Control with Motorized Vehicle Restriction Through
the Electronic Paid Road System***

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 179-193

The rapid increase the number of motorized vehicles has caused congestion on roads in Jakarta. In order to overcome these problems, the regional government issued a governor's Regulation Number 25 Year 2017 regarding Traffic Control With Motorized Vehicle Restriction Through The Electronic Paid Road System, which regulates the types and service rates of vehicles that can pass through the area. However, the vehicles subject to service rates in Governor's Regulation Number 25 Years 2017 are not in line with government regulation Number 97 Year 2012 regarding Retribution on Traffic Control and Retribution for Extension of Permits to Employ Foreign Workers. The problems to be examined are how the management of traffic needs through the implementation of electronic paid roads and how electronic road arrangements in Governor's Regulation Number 25 Year 2017 are reviewed from the hierarchy of laws and regulations. The purpose of writing is to know the management of traffic requirements through the application of electronic paid roads and electronic paid road arrangements in Governor's Regulation Number 25 Year 2017 in terms of the hierarchy of laws and regulations. This paper is compiled with normative juridical writing method. One of the ways to manage traffic needs is by limiting the traffic of individual vehicles and goods in certain corridors or areas at certain times and roads. In practice there is an inconsistency regarding the object of traffic control retribution stated in governor regulations and government regulations. And this inconsistency is not in line with the concept of the hierarchy of laws and regulations adopted by Indonesia. Therefore it is necessary to judicial review it to the Supreme Court.

Keywords: traffic requirements management, electronic roads pricing, traffic control fees

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Arif Usman

Badan Keahlian DPR RI

Analisis Hukum Perlindungan Hukum Nasabah Teknologi Finansial/*Financial Technology (Fintech)*

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 194-207

Berkembangnya industri *fintech* di Indonesia didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia, satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif untuk penegakan hukum perlindungan konsumen. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah *fintech* dan apa bentuk penyelesaian sengketa antara nasabah *fintech* dan perusahaan pemberi pinjaman. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah *fintech* dan bentuk penyelesaian sengketa. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber kepustakaan yang terdiri dari berbagai literature terkait dengan pengaturan *fintech* serta mengkaji naskah pendukungnya dari berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen Fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK No. 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Adapun pokok-pokok ketiga POJK tersebut mengatur mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*, mekanisme pemantauan dan pengawasan *fintech*, pembentukan ekosistem *fintech*, membangun budaya inovasi, dan inklusi dan literasi serta bentuk penyelesaian sengketa mekanisme *Internal Dispute Resolution (IDR)*, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan fasilitasi terbatas dari OJK.

Kata kunci: perlindungan konsumen, *fintech*, sengketa

Legal Analysis of Legal Protection of Financial Technology (Fintech) Customers

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 194-207

The development of the fintech industry in Indonesia is supported by the increasing number of internet access and smartphone users in Indonesia, one side provides benefits to consumers, because consumers get wider opportunities to access the services they want. However, on the other hand this condition also provides a negative possibility for consumer protection law enforcement. The problem in this paper is how is the form of legal protection for fintech customers and what forms of dispute resolution between fintech customers and lending companies. The purpose of this paper is to find out the form of legal protection for fintech customers and the form of dispute resolution. This paper is compiled with a normative juridical approach, namely by conducting a literature review which consists of various literature related to fintech regulation and reviewing the supporting texts of various laws and regulations. The conclusion obtained from this paper is that the OJK has issued several regulations relating to the protection of Fintech consumers, namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1 / POJK.07 / 2013 concerning the Protection of Consumer Financial Services Sector, POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services, and POJK No. 13 /POJK.02/2018 About Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. The POJK's three main points regulate the mechanism of recording and registering fintech, monitoring and monitoring mechanisms of fintech, the establishment of fintech ekosistem, building a culture of innovation, and inclusion and literacy in the form of dispute resolution Internal Dispute Resolution (IDR), Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) and limited facilitation from OJK.

Keywords: consumer protection, fintech, dispute

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Bagus Prasetyo

Badan Keahlian DPR RI

**Kajian Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan Pariwisata dan
Pemajuan Kebudayaan dalam Menunjang Peningkatan Perekonomian di Indonesia**

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 208-221

Pemajuan kebudayaan dan pariwisata memiliki pola yang berbeda dalam memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian nasional. Setiap sektor tersebut memiliki peraturan sebagai landasan hukum. Apabila peraturan antara sektor pariwisata dengan sektor kebudayaan tidak harmonis, setiap sektor akan terhambat untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan maka kehadiran hukum diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, bagaimana harmonisasi antara pengaturan pengelolaan kepariwisataan dan pemajuan kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia penting untuk diketahui. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Secara filosofis, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) maupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) memiliki tujuan yang sama yaitu melalui pengaturan dari kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satunya untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Beberapa definisi dalam kedua Undang-Undang tersebut bila ditafsirkan baik secara gramatikal, sistematikal, dan ekstensif serta restriktif juga telah terdapat keselarasan serta mencerminkan korelasi antara kebudayaan dan pariwisata yang tergambar bahwa hubungan antara budaya dan pariwisata memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Beberapa nilai serta antara asas dan tujuan dari pemajuan kebudayaan dan kepariwisataan dalam kedua undang-undang tersebut juga telah harmonis. Dengan berbagai keselarasan tersebut maka pengaturan pengelolaan pariwisata berdasarkan UU tentang Kepariwisataan dan pemajuan kebudayaan berdasarkan UU tentang Pemajuan Kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia dapat dikatakan berjalan secara harmonis dan diharapkan penerapannya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata kunci: harmonisasi, kepariwisataan, pemajuan kebudayaan

Harmonization Study on the Regulation of Culture Management and Tourism Management in Supporting Economic Improvement in Indonesia

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 208-221

The promotion of culture and tourism certainly has a different pattern in contributing to advancing the national economy. Each of these sectors has a set of rules that make them have a legal basis. If the regulations between the tourism sector and the cultural sector are not harmonious, each sector will be hampered to achieve its objectives. With the potential for conflict of interest, the presence of the law is needed to harmonize various interests. Therefore, how harmonization between the management arrangements for tourism and the promotion of culture in supporting economic improvement in Indonesia is important to know. The writing method used is a normative juridical method with a statutory approach. Philosophically, both Law Number 10 of 2009 concerning Tourism (the Law on Tourism) and Law Number 5 of 2017 concerning Cultural Progress (Law on Cultural Progress) have the same goal, namely through the regulation of the two laws it is expected that realizing national goals as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is one of them to increase the prosperity and welfare of the people of Indonesia. Some definitions in the two Laws if interpreted both grammatically, systemically, and extensively and restrictively also have harmony and reflect the correlation between culture and tourism illustrated that the relationship between Culture and tourism has a very close relationship and relationship. Some values and between the principles and objectives of promoting culture and tourism in the two laws have also been harmonious. With these various alignments, tourism management arrangements based on the Law on Tourism and the promotion of culture based on the Law on Promoting Culture in support of improving the economy in Indonesia can be said to be harmonious and it is hoped that its implementation can provide welfare to the community.

Keywords: harmonization, tourism, culture advancement

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Kuntari

Badan Keahlian DPR RI

Implikasi Hukum atas Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 222-236

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU tentang Tapera) diharapkan akan memberi akses lebih mudah bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki rumah layak. Pasal 65 UU tentang Tapera menjamin adanya hak peserta atas pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU tentang Tapera Pegawai Negeri Sipil (PNS) diasumsikan berpenghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR) dan kepesertaannya dalam Tapera bersifat wajib. Akan tetapi, tidak semua PNS berhak atas dana Tapera karena Pasal 27 UU tentang Tapera mengatur bahwa fasilitas pembiayaan Tapera hanya bagi peserta Tapera yang memenuhi persyaratan. Ketiadaan peraturan pelaksanaan UU tentang Tapera juga akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi PNS untuk dapat mengakses hak pemanfaatan dana Tapera. Metode penulisan yaitu hukum normatif, penyajian penulisan dilakukan secara deskriptif analitis dengan membandingkan hak PNS sebelum dan setelah berlakunya UU tentang Tapera serta menggambarkan implikasinya bagi PNS. Sebelum UU tentang Tapera lahir, seluruh PNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III seketika berhak memperoleh hak pemanfaatan dana tabungan untuk pembiayaan perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum). UU tentang Tapera menempatkan PNS sebagai peserta wajib yang berpenghasilan di atas UMR namun tidak serta merta berhak mengakses hak atas pemanfaatan dana Tapera untuk pembiayaan rumah karena harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Agar jelas pelaksanaan hak PNS atas pemanfaatan dana Tapera maka perlu segera dibentuk peraturan pelaksanaan dari UU tentang Tapera. Kata kunci: hak atas rumah, tabungan perumahan rakyat, pegawai negeri sipil

**Legal Implication of the Utilization of the People's Housing Savings Funds
for Civil Servants Based on Law Number 4 Year 2016 on People's Housing Savings**

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 222-236

Law Number 4 Year 2016 expected to provide easier access for Indonesian citizens to have a decent house. Article 65 guarantees the rights of participants of the Public Housing Savings (Tapera) to use Tapera funds. Based on Article 7 paragraph (1) civil servants are assumed to have income above the Regional Minimum Wage and their participation is mandatory. However, not all civil servants are entitled to Tapera funds because Article 27 stipulates that Tapera financing facilities are only for participants who meet the requirements. The absence of implementing regulations will also potentially uncertainty for civil servants to be able to access the right on Tapera funds. Writing methods are normative legal approach, presented in an analytical descriptive manner by comparing the rights of civil servants before and after the enactment of the Law Number 4 Year 2016 and illustrating the juridical implications. Before the Law Number 4 Year 2016 was born, all civil servants Group I, II, and III are immediately have the right to obtain the right to use savings funds for housing finance managed by the Bapertarum. The Law Number 4 Year 2016 places civil servants as mandatory participants who earn above the UMR but does not immediately have the right to use Tapera funds because they must fulfil the requirements managed by BP Tapera. In order to make clear the implications of the rights of civil servants to the utilization of Tapera funds, it is necessary to immediately establish an implementing regulation of the Law on Tapera.

Keywords: rights on house, public housing savings, civil servants

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

R.Priharta Budiprasetya E.P.Y

Badan Keahlian DPR RI

Urgensi Pengaturan Bank Tanah di Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 237-249

Pada saat ini pertumbuhan penduduk belum sepenuhnya diiringi dengan penambahan tempat hunian, kemajuan ekonomi, kebutuhan akan segala infrastruktur penunjang bagi ruang gerak manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses berbagai pihak terhadap tanah. Ketersediaan tanah untuk pembangunan menjadi permasalahan bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) telah mengamanatkan bahwa negara hanya boleh menguasai tanah dan bukan sebagai pemilik tanah. Dibutuhkan strategi dan metode yang mampu menyelesaikan persoalan ketersediaan lahan secara mendasar, sistematis, efektif efisien, dan berjangka panjang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan di masa depan. Salah satu konsep sebagai jalan keluar yang patut dipertimbangkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bank tanah. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan mengetahui pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan bank tanah di Indonesia dan mendapatkan pengaturan model bank tanah yang dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari tulisan ini adalah pengaturan bank tanah di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan dan memerlukan kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang dan pilihan model bank tanah harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan terbesar yang dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Agar terwujud secara nyata dan bermanfaat bagi masyarakat maka sudah seharusnya pengaturan Bank Tanah termuat dalam Undang-Undang tentang Pertanahan.

Kata kunci: pengaturan, bank tanah, model bank tanah

The Urgency to Regulate Land Banking in Indonesia

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 237-249

At present the population growth is not yet fully accompanied by the increase in occupancy, economic progress, the need for all supporting infrastructure for human movement, the level of community legal awareness and the ease of access of various parties to the land. The availability of land for development has become a problem for the government in recent years. Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles has mandated that the state may only control land and not as landowners. Strategies and methods are needed that are able to solve the problem of land availability in a fundamental, systematic, efficient, and long-term way to meet the demands of future needs. One concept as a solution that should be considered for regulation in Indonesian legislation is a land banking. Based on this description there are problems, namely what is the urgency of regulating land banking in Indonesia and how is the regulation of land banking models applicable in Indonesia. This paper aims to determine the urgency of regulating land banking in Indonesia and to know the arrangement of land banking models that can be applied in Indonesia. The discussion in this paper uses a normative juridical method by examining the substance and positive law that strengthens the urgency of regulating land banking in Indonesia and obtaining arrangements for a land banking model that can be applied in Indonesia. The conclusions of this paper are that the regulation of land banking in Indonesia is urgent to be carried out and requires legal certainty in the form of regulation in the law and the choice of land banking models must be based on the greatest benefit that can be accepted by the people of Indonesia. In order to be manifest and beneficial to the community, the regulation of the Land Banking should be contained in the Law on Land Affairs.

Keywords: regulation, land banking, land banking models

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Atisa Praharni

Badan Keahlian DPR RI

Promosi Produk Kosmetik melalui *Endorsement* di Instagram dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 237-249

Teknologi informasi yang semakin berkembang menciptakan berbagai variasi bentuk strategi promosi kosmetik di media sosial antara lain melalui *endorsement* di Instagram. Artis, selebgram, ataupun *public figure* yang meng-*endorse* produk kosmetik bernarasi sedemikian rupa agar pengikut (*follower*) nya tertarik membeli produk yang di-*endorse*-nya. Hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana promosi produk kosmetik melalui Instagram dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui promosi produk kosmetik melalui *endorsement* di Instagram dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas dari promosi produk kosmetik melalui *endorsement* di Instagram dan artis, selebgram, ataupun *public figure* yang mengendorse produk kosmetik wajib memberikan informasi yang jelas dalam *endorsement*nya.

Kata kunci: promosi, *endorsement*, instagram, perlindungan konsumen

Promotion of Cosmetic Products Through Endorsement in Instagram in the Legal Perspective of Consumer Protection

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 237-249

The ever-growing information technology creates a variety of cosmetic promotion strategies on social media, including through support on Instagram. Artists or public figures who endorse cosmetic products to participate (followers) are interested in buying endorsed products. Cosmetic complications promoted by endorsers are cosmetic / illegal / do not meet the requirements that protect health. Some consumers believe in cosmetics that are endorsed without thinking about cosmetics that are required or not. Related with the problem, this paper supports the promotion of cosmetic products through support on Instagram in the perspective of consumer protection law. The selection method used is a normative juridical analysis method using primary legal materials about legislation and books related to consumer protection law. Based on the analysis in this study concluded that consumers have the right to clear information from the promotion of cosmetic products through endorsement on Instagram and artists, celebrities, or public figures who endorse the necessary cosmetic products to provide clear information in their endorsement.

Keywords: promotion, cosmetic, instagram, consumer protection

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Chairul Umam

Badan Keahlian DPR RI

Kajian Yuridis Pelindungan Hak Cipta Koleksi Legal Deposit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 237-249

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (UU tentang SSKCKR) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam memberikan harapan baru bagi optimalisasi kewajiban *legal deposit* di Indonesia. Namun minimnya pengaturan pelindungan hak cipta dalam UU tentang SSKCKR menimbulkan kekhawatiran akan keamanan koleksi *legal deposit* dari penyalahgunaan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana UU tentang SSKCKR mengatur pelindungan hak cipta koleksi *legal deposit*, pengaturan *legal deposit* dan pelindungan hak ciptanya dalam praktik internasional, serta model pengaturan pelindungan hak cipta koleksi *legal deposit* yang dapat diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengetahui tentang pengaturan *legal deposit* dalam UU tentang SSKCKR dan praktik internasional hak cipta *legal deposit* serta model yang diterapkan di Indonesia melalui metode studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Kajian menemukan bahwa pengaturan UU tentang SSKCKR belum memberikan pelindungan hak cipta yang memadai terhadap koleksi *legal deposit* seperti yang terdapat dalam praktik internasional di beberapa negara. Walaupun terdapat pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta), namun masih belum menjangkau seluruh aspek pelindungan hak cipta terutama yang terkait dengan pengelolaan koleksi *legal deposit* sehingga jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam peraturan pelaksanaan UU SSKCKR, pelindungan hak cipta koleksi *legal deposit* di Indonesia dapat mengacu ketentuan praktik internasional yang ada. Pelindungan hak cipta koleksi *legal deposit* yang dapat dijadikan acuan diantaranya yaitu yang terkait pelestarian, pengolahan, dan pendayagunaan koleksi *legal deposit*.

Kata kunci: *legal deposit*, hak cipta, pelindungan

***Juridical Analysis of Copyright Protection of Legal Deposit Collection
in Law Number 13 Year 2018 Concerning Submission and Deposit of Printed and Recorded Works***

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 237-249

The issuance of Law Number 13 of 2018 concerning the Submission and Deposit of Printed and Recorded Works (SSKCKR Law) in lieu of Law Number 4 of 1990 concerning the Submission and Deposit of Printed and Recorded Works brings new hope for the optimization of legal deposit obligations in Indonesia. But the lack of copyright protection arrangements in the SSKCKR Law raises concerns about the security of legal deposit collections from abuse. The issues raised in this paper are how the SSKCKR Law regulates the protection of copyright of legal deposit collections, the regulation of legal deposits and their copyrights protection in international practices, and the model of copyright protection of legal deposit collections that can be applied in Indonesia. This paper aims to find out about the legal deposit arrangements in the SSKCKR law and international legal deposit copyright practices and models applied in Indonesia through literature study methods and presented descriptively analytically. The study found that the regulation of the SSKCKR Law did not provide adequate copyright protection for the legal deposit collections as contained in international practices in several countries. Although there is protection in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (Copyright Law), it still does not cover all aspects of copyright protection, especially those related to the management of legal deposit collections and if not anticipated it can cause problems later on. Therefore, in implementing regulations, copyright protection of legal deposit collections in Indonesia can refer to the existing international practices. Copyright protection of legal deposit collections that can be used as a reference includes those relating to preservation, processing, and utilization of legal deposit collections.

Keywords: legal deposit, copyright, protection

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 1, JULI 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Olsen Peranto

Badan Keahlian DPR RI

Pemberantasan Pengaturan Skor di Kompetisi Liga Indonesia oleh Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola menurut Prinsip Non-Intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 1, Juli 2019, halaman 237-249

FIFA merupakan organisasi privat internasional yang memiliki instrumen hukum yaitu Statuta *FIFA* yang harus ditaati oleh para anggotanya. Sebagai organisasi induk yang bersifat tunggal yang membidangi sepakbola secara global maka *FIFA* menerapkan prinsip non-intervensi terhadap pihak ketiga. PSSI merupakan anggota *FIFA* dan tunduk pada ketentuan Statuta *FIFA*. Prinsip non-intervensi mengatur bahwa setiap anggota *FIFA* harus mengurus organisasinya secara independen tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga. Akibat maraknya pengaduan masyarakat tentang dugaan pengaturan skor di Liga Indonesia musim 2018 maka dibentuk Satgas Anti Mafia Bola pada tanggal 21 Desember 2018. Pengaturan Skor diatur dalam Statuta *FIFA*, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Satgas Anti Mafia Sepakbola memproses secara pidana para oknum yang diduga pelaku pengaturan skor menggunakan mekanisme hukum nasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan satgas dalam memberantas pengaturan skor menurut Prinsip non-intervensi dalam Statuta *FIFA* dan Statuta PSSI serta bagaimana sebaiknya penegakan hukum terhadap kasus pengaturan skor. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan Satgas dalam pemberantasan pengaturan skor yang memproses para pelaku dengan menggunakan mekanisme hukum nasional dengan mendahului mekanisme Statuta PSSI merupakan bentuk campur tangan terhadap urusan internal PSSI sebab pengaturan skor pada prinsipnya ada dalam ranah Statuta *FIFA*, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Tindakan Satgas dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk pengecualian dari prinsip non-intervensi. Sekalipun terdapat kelemahan pengaturan dalam Statuta PSSI namun penegakan hukum melalui mekanisme hukum nasional dapat diterapkan apabila telah melalui mekanisme aturan PSSI ataupun setelah adanya persetujuan dari PSSI khususnya terhadap pelaku internal.

Kata kunci: prinsip non-intervensi, statuta *FIFA*, statuta PSSI, satgas anti mafia sepakbola, pengaturan skor

Match Fixing Settlement in The Indonesian League by the Anti Football Mafia Task Force Based on the Principle of Non-Intervention in the FIFA Statutes and the PSSI Statutes

Prodigy Journal Vol. 7 No. 1, July 2019, page 237-249

FIFA is an international private organization that has legal instruments, namely the FIFA Statutes which must be complied by its members. As a single organization in charge of football globally, FIFA applies the principle of non-intervention to third parties. As a member of FIFA, PSSI is subject to the provisions of the FIFA Statutes. The principle of non-intervention stipulates that every member of FIFA should exercise their affairs independently without influenced by any third parties. As a result of massive public complaints about the alleged match fixing in the Indonesian League 2018 season, the Anti Football Mafia Task Force was formed on December 21, 2018. Match Fixing is regulated in the FIFA Statutes, The PSSI Statutes, and The PSSI Discipline Codes. The task force processing criminal investigation to the suspects using the criminal mechanism of national law. This paper aims to examine the task force's actions in eradicating match fixing according to the principle of non-intervention in the FIFA Statutes and the PSSI Statutes and how it should be enforced. This paper uses a normative juridical writing method. The task force's action in eradicating the match fixing that processes the suspects by using the national legal mechanism by overtaking the Statutes of the PSSI mechanism is a form of intervention to the internal matters of PSSI because match fixing in principle is within the FIFA Statutes, the PSSI Statutes, and the PSSI Discipline Code. The task force actions can be justified in certain circumstances as a form of exclusion from the principle of non-intervention. Even though there are weaknesses in the regulation of the PSSI Statutes, but law enforcement through national legal mechanisms can be applied if it has been through the PSSI rule mechanism or after the approval of PSSI, especially for internal actors.

Keywords: principle of non-intervention, FIFA statutes, PSSI statutes, anti-football mafia team, match fixing